

LAPORAN TRIWULAN III 2023



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena atas Anugerah dan cinta kasihnya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Triwulan 3 Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan 3 Tahun Anggaran 2023

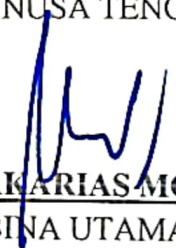
Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan 3 Tahun Anggaran 2023 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan harus di capai, juga sebagai bahan evaluasi dalam rangka upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Secara umum, target dan sasaran kinerja periode Triwulan 3 Tahun 2023 ini telah dapat dicapai sesuai yang di targetkan. Pencapaian yang baik pada periode ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2023. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT maupun pihak lainnya perlu di jaga untuk mencapai kinerja yang telah ditergetkan.

Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, atas tersusunya laporan ini. Kami berharap kritik membangun untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Semoga laporan kinerja triwulan 3 Tahun Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, Oktober 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Drs. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631209 198603 1 016

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Organisasi dan Personalia	3
1.5 Sistematika Penyajian	6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah	7
2.2 Target Kinerja.....	7
2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2023.....	9

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	14
A. Pelayanan Administrasi dan Umum.....	14
B. Kepegawaian	14
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	17
A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah.....	17
1. Realisasi Pendapatan	18
2. Realisasi Belanja	23
B. Kinerja Badan Keuangan Daerah.....	34
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	38
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	70

BAB IV PENUTUP	71
4.1 Permasalahan dan Solusi	71
1. Sekretariat	71
2. Bidang Anggaran.....	71
3. Bidang Perbendaharaan	72
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan	73
4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	73

BAB IV PENUTUP	82
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5
---	---

DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah	8
2.2 Penganggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2023	9
3.1 Rekapitulasi Surat Masuk	14
3.2 Rekapitulasi Surat Keluar	14
3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	15
3.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	15
3.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	15
3.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum.....	16
3.7 Komposisi Tenaga Kontrak	16
3.8 Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan.....	18
3.9 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah.....	23
3.10 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Anggaran.....	41
3.11 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	42
3.12 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Perbendaharaan.....	59
3.13 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan September Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan berbagai program kegiatan dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Bulan September 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Bulan September Tahun Anggaran 2023 yang diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122).

- n. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2017.
- o. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- p. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bulan September Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan September Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

1.4 Organisasi dan Personalia

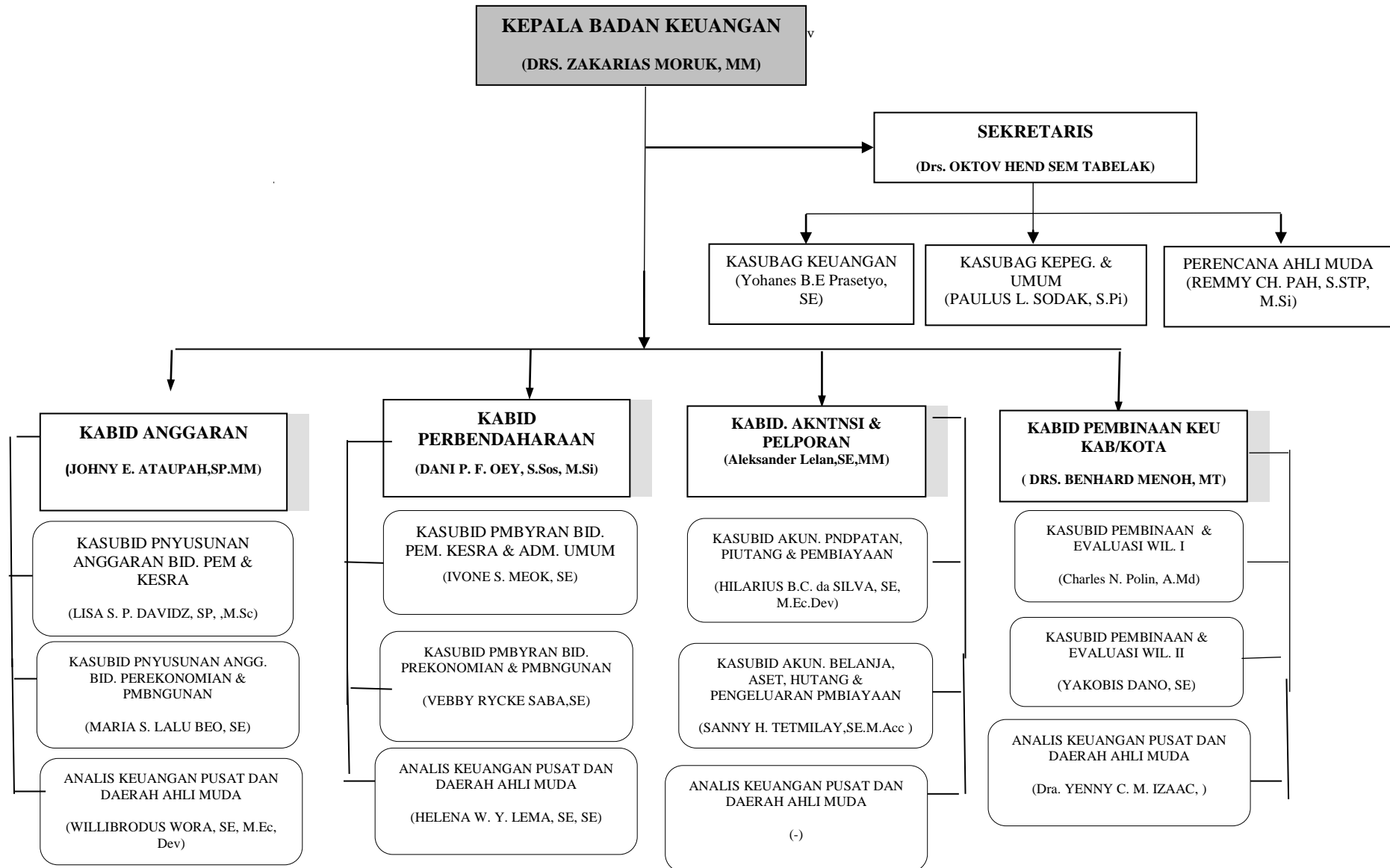
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Kinerja Triwulan 3 periode bulan Juli s.d September Tahun 2023 ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bulan September 2023. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bulan September Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			AWAL	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang di hasilkan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah seluru dokumen yang di hasilkan}} \times 100\%$

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.927.138.170,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 947.253.712.446,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.398.409.172,-
Jumlah		Rp. 963.579.259.788,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2023

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu
1						2	3
5	02					KEUANGAN	963.574.259.788
						Badan Keuangan Daerah	963.574.259.788
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.927.138.170
5	02	01	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.435.900
5	02	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000
5	02	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.351.800
5	02	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.455.000
5	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.629.100
5	02	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.206.392.818
5	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.990.123.218
5	02	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600

5	02	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.163.000
5	02	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000
5	02	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000
5	02	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000
5	02	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000
5	02	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.473.000
5	02	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.473.000
5	02	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.304.480
5	02	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.892.480
5	02	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.412.000
5	02	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	210.000.000
5	02	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	210.000.000
5	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000
5	02	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.066.400
5	02	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.066.400
5	02	01	1	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.012.010.572
5	02	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400
5	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000
5	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	3.109.445.172
5	02	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.455.000
5	02	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000
5	02	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.635.000
5	02	02	1			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	947.253.712.446

5	02	02	1	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.425.692.781
5	02	02	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	435.781.157
5	02	02	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	509.880.500
5	02	02	1	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	253.178.996
5	02	02	1	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	253.164.828
5	02	02	1	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.896.237.300
5	02	02	1	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.087.268.400
5	02	02	1	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.990.181.600
5	02	02	1	02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.293.566.700
5	02	02	1	2	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.855.500
5	02	02	1	02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.570.900
5	02	02	1	02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	502.371.800
5	02	02	1	02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	779.597.000
5	02	02	1	02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.171.500
5	02	02	1	02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.000
5	02	02	1	03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.907.327.688

5	02	02	1	03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500
5	02	02	1	03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100
5	02	02	1	03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696
5	02	02	1	03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	226.999.696
5	02	02	1	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696
5	02	02	1	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.406.129.102
5	02	02	1	04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	25.000.000
5	02	02	1	04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	319.457.002
5	02	02	1	04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.061.672.100
5	02	02	1	05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	931.220.996.175
5	02	02	1	05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	70.214.974.393
5	02	02	1	05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	11.474.756.000
5	02	02	1	05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	94.474.763.775
5	02	02	1	05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	769.891.429.886

5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.393.409.172
5	02	03	1	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.393.409.172
5	02	03	1	01	01	Penyusunan Standar Harga	1.393.409.172

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Juli s.d September 2023

Unit	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023
Sekretariat	58	57	32
Bidang Anggaran	48	92	62
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	43	83	69
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	4	5	5
Bidang Perbendaharaan	53	108	64

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Juli s.d September 2023

Unit	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023
Sekretariat	36	48	43
Bidang Anggaran	9	7	9
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	27	28	32
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	24	28	26
Bidang Perbendaharaan	44	29	27

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 69 orang, dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan 30 September 2023).

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Juli s.d September 2023

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	1 orang	III-a	Ada
3.	Kepala Bidang	4 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	13 orang	IV-a	Ada
5.	Kelompok Jabatan Fungsional.	50orang		Ada
Total		69 orang		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Juli s.d September 2023

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	9	9	-	1	15	2
2.	Bidang Anggaran	6	4	-	2	5	3
3.	Bidang Perbendaharaan	4	9	-	-	13	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	10	-	-	13	2
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	6	6	-	1	9	2
Jumlah		33	38		4	55	10
Total		69		69			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama
Juli s.d September 2023

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	9	7	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	9	3	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	7	6	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7	6	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	2	1	1	-
<i>Jumlah</i>		40	24	4	1	-
Total		69				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum
Juli s.d September 2023

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	3	-	1	11	2
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	2	-	7	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	10	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	6
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	-	5	4
<i>Jumlah</i>		-	-	6	6	1	40	16
Total		69						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.
Komposisi Tenaga Kontrak Daerah
Juli s.d September 2023

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	40
2	PEREMPUAN	33
Total		73 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023, Target Pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp.3.347.190.047.050,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi 30 September 2023:

Tabel. 3.8
Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah
Juli s.d September 2023

						Uraian	Pagu	Realisasi	%
4						PENDAPATAN DAERAH	3.347.190.047.050	318.685.789.008	9,52
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.275.172.050		
4	1	01				Pajak Daerah			
4	1	01	05			Pajak Rokok			
4	1	01	05	01		Pajak Rokok			
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok			
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.982.172.050		
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	86.982.172.050		
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	86.982.172.050		
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN (Lembaga Keuangan)	86.982.172.050		
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	59.293.000.000		

4	1	04	05			Jasa Giro	59.293.000.000		
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah	59.293.000.000		
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	59.293.000.000		
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	1.000.000.000		
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000		
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000		
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.891.500.000		
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	23.891.500.000		
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	23.891.500.000		
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.891.500.000		
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.891.500.000		
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.891.500.000		
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian	1.510.000.000		
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	10.000.000		
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	10.000.000		
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000		
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000		
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000		
4	1	04	05	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000		
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	3.199.163.279.000	318.685.789.008	9,96

4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.199.163.279.000	318.685.789.008	9,96
4	2	01	01			Dana Perimbangan	3.199.163.279.000	318.685.789.008	9,96
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	53.785.499.000	10.089.195.500	18,76
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.215.041.000	1.018.863.800	31,69
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	42.774.519.000	42.774.519.000	100,00
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.442.849.000	515.427.900	8,00
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.139.084.000		
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	214.006.000		
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.857.019.095.000	153.558.180.808	8,27
4	2	01	01	02	0001	DAU	1.857.019.095.000	153.558.180.808	8,27
4	2	01	01	03		DANA ALOKASI KHUSUS	1.288.358.685.000	155.038.412.700	12,03
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	474.648.628.000	145.857.962.700	30,73
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	76.332.590.000		
						∴ SMK	121.920.575.000	54.301.758.750	44,54
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	11.138.775.000		
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah			
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	22.289.568.000		
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian			
						DAK Fisik BidangPertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana pembangunan pertanian	17.015.773.000	3.403.943.550	20,00

4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-		
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	31.926.486.000	10.917.499.950	34,20
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	147.670.491.000	62.302.830.300	42,19
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.784.830.000	2.401.652.700	50,19
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	17.708.286.000	6.686.113.950	37,76
4	2	01	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan- Penugasan	5.337.006.000	5.844.163.500	109,50
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	813.710.057.000	9.180.450.000	1,13
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-DANA BOS	519.743.950.000	6.508.750.000	1,25
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	510.101.450.000	6.508.750.000	1,28
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	9.642.500.000		
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	245.164.152.000		
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	13.442.250.000		
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	8.734.736.000		
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000	1.000.000.000	50,00
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000	1.000.000.000	50,00
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.936.156.000		
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.345.413.000		
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	375.000.000		
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	968.400.000	671.700.000	69,36
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)			
4	2	01	02	01		DID			

4	2	01	02	01	0001	DID			
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.751.596.000		
4	3	01				Pendapatan Hibah	1.751.596.000		
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000		
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000		
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000		

SumberBidangPerbendaharaan(BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : 911/25/DPA/BKUD2/2023, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 963.574.259.788 ,-** Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah
Juli s.d September 2023

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5	2					KEUANGAN	963.574.259.788	464.175.413.101	48,17%
						Badan Keuangan Daerah	963.574.259.788	464.175.413.101	48,17%
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.927.138.170	9.698.758.424	64,97%
5	2	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.435.900	172.015.000	69,52%
5	2	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	27.857.400	92,86%
5	2	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.351.800	35.138.000	58,22%
5	2	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.455.000	72.996.500	93,04%
5	2	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.629.100	36.023.100	45,92%
5	2	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.206.392.818	5.545.794.981	60,24%
5	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.990.123.218	3.910.658.781	55,95%
5	2	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600	1.510.543.000	74,15%

5	2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.163.000	71.451.000	59,96%
5	2	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	24.547.200	81,82%
5	2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	28.595.000	95,32%
5	2	1	1	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	4.800.000	96,00%
5	2	1	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.800.000	96,00%
5	2	1	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.473.000	61.217.500	65,49%
5	2	1	1	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.473.000	61.217.500	65,49%
5	2	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.304.480	764.622.727	86,86%
5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.892.480	166.822.500	98,19%
5	2	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.412.000	46.120.000	91,49%
5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	210.000.000	106.808.415	50,86%
5	2	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	210.000.000	207.399.057	98,76%
5	2	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	237.472.755,	98,95%
5	2	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.066.400	120.222.811	63,25%
5	2	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.066.400	120.222.811	63,25%
5	2	1	1	8	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.012.010.572	2.772.124.420	69,10%
5	2	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	12.354.500	33,79%
5	2	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000	500.000.000	57,14%
5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	3.109.445.172	2.259.769.920	72,67%

	2	1	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.455.000	257.960.985	91,01%
5	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	221.985.985	93,74%
0	1	0	9	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaA	46.635.000	35.975.000	77,14%
5	2	2	1			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	947.253.712.446	453.167.194.602	47,84%
5	2	2	1	1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.425.692.781	3.908.192.490	41,46%
5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	435.781.157	324.680.781	74,51%
5	2	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	509.880.500	325.056.444	63,75%
5	2	2	1	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	253.178.996	207.639.060	82,01%
5	2	2	1	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	253.164.828	43.308.600	17,11%
5	2	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.896.237.300	469.839.985	16,22%
5	2	2	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.087.268.400	1.494.285.640	48,40%
5	2	2	1	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.990.181.600	1.043.381.980	52,43%
5	2	2	1	2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.293.566.700	1.386.167.855,	60,44%
5	2	2	1	2	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.855.500	42.379.441	9,75%

5	2	2	1	2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.570.900	156.021.700	35,82%
5	2	2	1	2	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	502.371.800	481.862.280	95,92%
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	779.597.000	618.259.792	79,31%
5	2	2	1	2	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.171.500	63.877.642	54,99%
5	2	2	1	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.000	23.767.000	95,07%
5	2	2	1	3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.902.327.688	1.348.978.652	70,91%
5	2	2	1	3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500	408.593.100	89,62%
5	2	2	1	3	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100	68.279.900	28,02%
5	2	2	1	3	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696	261.067.100	67,83%
5	2	2	1	3	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	226.999.696	177.883.207	78,36%

5	2	2	1	3	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696	433.155.345	72,69%
5	2	2	1	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.406.129.102	2.111.881.777	87,77%
0	2	1	0	4	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	25.000.000	-	-
5	2	2	1	4	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	319.457.002	202.133.000	63,27%
5	2	2	1	4	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.061.672.100	1.909.748.777	92,63%
5	2	2	1	5		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	931.220.996.175	444.411.973.828	47,72%
5	2	2	1	5	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	70.214.974.393	1.814.623.048	2,58%
5	2	2	1	5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	11.474.756.000	-	-
5	2	2	1	5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	79.639.835.896	847.646.125	1,06%
5	2	2	1	5	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	769.891.429.886	441.749.704.655	57,38%
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.393.409.172	1.309.460.075	93,98%
5	2	3	1	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.393.409.172	1.309.460.075	93,98%
5	2	3	1	1	1	Penyusunan Standar Harga	1.393.409.172	1.309.460.075	93,98%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional September 2023

B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selama bulan September 2023, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggung jawab teknis dari Sekretariat berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2023 terdiri dari 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 3 program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu sebesar Rp. 247.435.900,- Realisasi sebesar Rp. 172.015.000,- (69,52%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan,

- ⇒ Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 telah disusun pada Badan Keuangan Daerah Bulan September 2023;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- ⇒ Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggara 2023.

- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Laporan bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 9.206.392.818,- Realisasi Rp. 5.545.794.981 (60,24%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Verifikasi SPJ pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 5.000.000,- Realisasi Rp. 4.800.000- (96,00%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 93.473.000,- Realisasi Rp. 61.217.500,- (65,49%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.

⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.

⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.

⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 880.304.480,- Realisasi Rp. 764.622.727,- (86,86%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 190.066.400,- Realisasi Rp. 120.222.811,- (63,25%).

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar Rp. 4.012.010.572,- Realisasi Rp. 2.772.124.420,- (69,10%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan

- ⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp. 283.455.000,- Realisasi Rp. 257.960.985,- (91,01). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 947.253.712.446,- Realisasi Rp. 453.167.194.602 (47,84%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 9.425.692.781,- Realisasi Rp. 3.908.192.490 (41,46%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

1. Konsultasi terkait Validasi Data Syarat Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2023 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
2. Koordinasi terkait administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang mengikuti Pengayaan Bahasa (Badan Kepegawaian Daerah);
3. Konsultasi terkait Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
4. Koordinasi terkait Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Kelangkaan Profesi (RSUD Prof. Dr. W. Z. Johanes);
5. Koordinasi terkait Data Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi NTT (Badan Kepegawaian Daerah);
6. Konsultasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2023 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
7. Konsultasi terkait Link Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Provinsi NTT (Dinas Pemuda dan Olahraga).

Tabel 3.10

Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah

Juli s.d September 2023

Program	Rincian Kegiatan	Target (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Realisasi (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran APBD	Rapat Terkait Pembahasan Perubahan Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun 2023	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat Terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap I Dan Tahap II Serta Rencana Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tahap II	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA. 2023	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Proses Percetakan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi

		- Proses Percetakan Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi
		- Proses Percetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi
		- Proses Percetakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi
		- Proses Percetakan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT atas Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT atas Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi
		- Proses Percetakan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi
		- Proses Percetakan Ringkasan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Ringkasan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi
		- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA. 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2023 di Kementrian Dalam Negeri	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi

	2. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	- Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD TA. 2024	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Proses Percetakan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024	Dokumen Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024	Terealisasi
		- Proses Percetakan Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024	Dokumen Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024	Terealisasi
		- Proses Percetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTT TA. 2024	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTT TA. 2024	Terealisasi
		- Proses Percetakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT TA. 2024	Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT TA. 2024	Terealisasi
		- Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD TA. 2024	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
	3. Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan PPAS	- Rapat Paripurna Terkait penetapan perubahan KUA-PPAS APBD TA. 2023	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Perubahan KUA-PPAS TA. 2023	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi

		- Proses Percetakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023	Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023	Terealisasi
		- Proses Percetakan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Penambahan Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan PPAS yang tidak Terdapat dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT TA. 2023	Dokumen Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Penambahan Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan PPAS yang tidak Terdapat dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT TA. 2023	Terealisasi
	4. Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Proses Percetakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024	Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024	Terealisasi

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 2.293.566.700,- Realisasi Rp. 1.386.167.855, (60,44%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11

**Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan
Keuangan Daerah Juli s.d September 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Rekapitulasi data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur Nomor 900/183/BKUD5.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Hal Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan sebagai berikut : 1) Data Perda a. Kab. TTS b. Kab. Belu c. Kab. Rote Ndao d. Kab. Ngada e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU 2) Data Perkada a. Kab. Ngada b. Kab. TTS c. Kab. Belu	Data Perda dan Perkada masih tersisa 16 kab/kota yang belum menyampaikan

			d. Kab. Rote Ndao e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU	
	2. Rekapitulasi data Berita Acara Kesepakatan Penganggaran Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024	Berita Acara Kesepakatan Penganggaran Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024	Berita Acara Kesepakatan Penganggaran Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024. Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan 21 Kab/kota kecuali Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih dalam proses pembahasan	
	3. Penyampian surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1924/BKUD5.3/2023 Tanggal 18 September 2023 hal Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT	Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1924/BKUD5.3/2023 Tanggal 18 September 2023 hal Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT.	Hadirnya pejabat dari Badan Keuangan Daerah/BPKAD kab/kota dan pejabat dari BAPPEDA/BAPPE LITBANGDA kab/kota	
	4. Pelaksanaan Lokakarya Rencana Implementasi Bantuan Keuangan Provinsi NTT sekaligus	Lokakarya Rencana Implementasi Bantuan	Terinformasinya Rencana Implementasi Bantuan	Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring pada

	Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Keuangan Provinsi NTT sekaligus Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Keuangan Provinsi NTT dan tersosialisasinya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	hari Jumat, 22 September 2023 di Hotel Sotis Kupang jln Timor Raya Km 3 No.90 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Prov. NTT
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
	1. Penyampaian surat Gubernur NTT Nomor 067/1880/BKUD5.1/2023 Tanggal 12 September 2023 Hal Penegasan Percepatan Penyelesaian Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT	Surat Gubernur NTT Nomor 067/1880/BKUD5.1/2023 Tanggal 12 September 2023 Hal Penegasan Percepatan Penyelesaian Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT	Terinformasinya Penegasan Percepatan Penyelesaian Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023 kepada Pj. Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT	
	2. Penyusunan Surat	Surat Perintah	ASN bidang	Pelaksanaan

	Perintah Kerja (SPK) Nomor 067/1775/BKUD5.2/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 dalam rangka untuk bekerja di luar jam dinas untuk persiapan Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2023 terhitung mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 6 September 2023	Kerja (SPK) Nomor 067/1775/BKUD5.2/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 dalam rangka untuk bekerja di luar jam dinas untuk persiapan Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2023 terhitung mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 6 September 2023	Pembinaan Keuangan Kab/Kota telah melaksanakan tugas diluar jam dinas dalam rangka persiapan evaluasi RANPERDA tentang Perubahan APBD kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD kab/Kota TA 2023	tugas diluar jam dinas dilaksanakan pada Tanggal 28 Agustus sampai dengan 6 September 2023.
	3. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 067/1710/BKUD.2/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Hal Percepatan penyelesaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2023	Dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Flotim, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023	Kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Flotim, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023	
	4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD	Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD	SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi	Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Senin,

	Kabupaten Sumba Barat dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Kabupaten Sumba Barat dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat dan Ranperbup Sumba Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 namun sambil menunggu penandatanganan SK oleh Gubernur NTT maka dikirimkan penyelarasan SK Evaluasi RAPBD Kab. Sumba Barat Nomor 900/184/BKUD5/2023 Tanggal 11 September 2023	4 September 2023 dan Penyelarasan SK dikirim pada hari Jumat, 22 September 2023
5.	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Belu dan Rancangan Peraturan Bupati Belu tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Belu dan Rancangan Peraturan Bupati Belu tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Belu TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Belu tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 11 September 2023 dan Penyelarasan SK dikirim pada hari Jumat, 22 September 2023

			Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 namun sambil menunggu penandatanganan SK oleh Gubernur NTT maka dikirimkan penyelarasan SK Evaluasi RAPBD Kab. Belu Nomor 900/185/BKUD5/2023 Tanggal 15 September 2023	
	6. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Flotim dan Rancangan Peraturan Bupati Flotim tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Flotim dan Rancangan Peraturan Bupati Flotim tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Flotim TA 2023 namun sambil menunggu penandatanganan SK oleh Gubernur NTT maka dikirimkan penyelarasan SK Evaluasi RAPBD Kab. Flotim Nomor 900/186/BKUD5/2023 Tanggal 15 September 2023	Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 dan Penyelarasan SK dikirim pada hari Jumat, 22 September 2023
	7. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sumba Tengah	Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sumba	SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan	Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 19 September

	dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Tengah dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumba Tengah TA 2023 namun sambil menunggu penandatanganan SK oleh Gubernur NTT maka dikirimkan penyelarasan SK Evaluasi RAPBD Kab. Sumba Tengah Nomor 900/189/BKUD5/2023 Tanggal 22 September 2023	2023 dan Penyelarasan SK dikirim pada hari Rabu, 27 September 2023
8.	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngada dan Rancangan Peraturan Bupati Ngada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngada dan Rancangan Peraturan Bupati Ngada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023	SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngada TA 2023 namun sambil menunggu penandatanganan SK oleh Gubernur NTT maka dikirimkan penyelarasan SK Evaluasi RAPBD Kab. Ngada Nomor 900/192/BKUD5/2023 Tanggal 2 Oktober 2023	Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 26 September 2023 dan Penyelarasan SK dikirim pada hari Jumat, 22 September 2023

9. Penyampaian surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Sumba Barat Nomor 913/1799/BKUD5.2/2023 Tanggal 1 September 2023	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Sumba Barat Nomor 913/1799/BKUD5.2/2023 Tanggal 1 September 2023	Surat rekomendasi dari kemendari Nomor 900.1.1.4/0940/SD. IV/DIT.I/IX/KEUD A/2023 Tanggal 8 September 2023 Hal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	
10. Penyampain surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Belu tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab belu Nomor 913/1851/BKUD5.3/2023 Tanggal 8 September 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Belu tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab belu Nomor 913/1851/BKUD5.3/2023 Tanggal 8 September 2023	Surat rekomendasi dari kemendari Nomor 900.1.1.4/0978/SD. IV/DIT.I/IX/KEUD A/2023 Tanggal 14 September 2023 Hal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Belu tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	
11. Penyampaian surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil	Surat rekomendasi dari kemendari Nomor 900.1.1.4/0977/SD. IV/DIT.I/IX/KEUD	

	Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Flotim tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Flotim Nomor 913/1852/BKUD5.3/2023 Tanggal 8 September 2023	evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Flotim tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Flotim Nomor 913/1852/BKUD5.3/2023 Tanggal 8 September 2023	A/2023 Tanggal 14 September 2023 Hal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Flotim tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	
	12.Penyampaian surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Sumba Tengah Nomor 067/1919/BKUD5.2/2023 Tanggal 18 September 2023	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait konsultasi hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Sumba Tengah Nomor 067/1919/BKUD5.2/2023 Tanggal 18 September 2023	Surat rekomendasi dari kemendari Nomor 900.1.1.4/1033/SD. IV/DIT.I/IX/KEUD A/2023 Tanggal 20 September 2023 Hal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	
C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan			

	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Kabupaten SBD sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 067/74f2/BKUD.2/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Hal Percepatan Proses Penyelesaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.	Dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Kabupaten SBD Tahun Anggaran 2022	Kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Kabupaten SBD Tahun Anggaran 2022 sebagai sumber informasi dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022	
	2. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten SBD dan Rancangan Peraturan bupati SBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Kab. SBD dan Rancangan Peraturan bupati SBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Dalam proses penandatanganan SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan	Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 15 September 2023

			Peraturan Bupati SBD Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022	
	3. Penyampaian hasil evaluasi Rancangan Perda dan Perkada atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan para bupati se-NTT	Dokumen hasil evaluasi Rancangan Perda dan Perkada atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan para bupati se-NTT	Dokumen hasil evaluasi Rancangan Perda dan Perkada atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan para bupati se-NTT dengan surat Nomor 941/1896/BKUD5.2/2023 Tanggal 14 September 2023	2023
D.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			
	1. Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1818/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Pj. Walikota	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1818/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester	Hadirnya Kabid Satpol PP beserta para kasubdi satpol PP dalam rangka mengikuti rapat terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023	Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

	Kupang	II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Pj.Walikota Kupang		
	2. Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1819/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Bupati Kupang	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1819/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Bupati Kupang	Hadirnya Kabid Satpol PP beserta para kasubdi satpol PP dalam rangka mengikuti rapat terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023	Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
	3. Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1817/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Kepala KPPBC TMPC Kupang	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1817/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Kepala KPPBC TMPC Kupang	Hadirnya pejabat yang mewakili Kepala KPPBC TMPC Kupang beserta para staf dalam rangka mengikuti rapat terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023	Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
	4. Penyampian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Hadirnya Tim Sekretariat DBH-CHT Provinsi NTT TA 2023 dari	Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September

	005/1820/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT serta Kepala Satpol PP Prov. NTT	Timur Nomor 005/1820/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 September 2023 Hal Undangan terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT serta Kepala Satpol PP Prov. NTT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT dan Satpol PP Prov. NTT dalam rangka mengikuti rapat terkait rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023	2023 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
	5. Penyampian Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 900/183/BKUD5/2023 Tanggal 11 September 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Semester II Tahun Anggaran 2023	Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 900/183/BKUD5/2023 Tanggal 11 September 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Semester II Tahun Anggaran 2023	Terbentuknya Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Semester II Tahun Anggaran 2023	
	6. Pelaksanaan sosialisasi dan penegakkan hukum cukai rokok ilegal di wilayah kota kupang dan	Sosialisasi dan penegakkan hukum cukai rokok ilegal di	Dilakukan sosialisasi hari pertama diwilayah kota kupang yakni	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari selasa

	kabupaten kupang	wilayah kota kupang dan kabupaten kupang	di sepanjang jalan Hr Koroh kelurahan oepura dan kelurahan sikumana dengan dilakukan penindakan terhadap barang kena cukai rokok jenis sigaret kretek (SKM) berbagai merek dengan jenis pelanggaran dengan tidak dilekati pita cukai/rokok polos sebanyak 35 bungkus @20 batang= 700 batang, 1 bungkus @19 batang dengan total 719 batang BKC HT jenis SKM, serta 56 keping pita cukai bekas. Hari ke-2 dan ke-3 di wilayah airnona dan bakunase dengan dilakukan penindakan terhadap barang kena cukai rokok jenis sigare kretek (SKM) berbagai merek dengan jenis pelanggaran berjumlah 97 bungkus (1903	s.d hari Kamis tanggal 19 s.d 21 September 2023
--	------------------	--	---	---

			<p>batang) dan 378 keping pita cukai bekas. Hari pertama wilayah kabupaten kupang melaksanakan sosialisasi disepanjang jalan Timor raya dan oesu'u Kecamatan kupang timur dan amarasi penindakan terhadap barang kena cukai rokok jenis sigare kretek (SKM) berbagai merek dengan jenis pelanggaran berjumlah</p> <p>Salah peruntukkan 1.970 batang, tidak dilekati pita cukai/rokok polos 523 batang pita cukai bekas 191 keping total penidnakan 2.493 batang dan 191 keping pita cukai bekas. Kemudian dilanjutkan pada hari ke-2 dan ke-3 di desa tablolong kecamatan kupang barat dan dilakukan penindakan terhadap barang</p>	
--	--	--	---	--

			kena cukai rokok jenis sigare kretek (SKM) berbagai merek dengan jenis pelanggaran berjumlah 519.220 batang tidak dilekati pita cukai/rokok polos 420 batang total 519.640	
E.	Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 30 September 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Berlanjut untuk bulan Oktober Tahun 2023 yang akan dilaporkan di bulan Nopember Tahun 2023
	2. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2021	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya

	3. Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun 2022 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
F.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan laporan kegiatan bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota bulan September 2023	Laporan kegiatan bidang pembinaan kabupaten/kota bulan September 2023	Disampaikan laporan kegiatan bidang pembinaan kabupaten/kota bulan September 2023 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Telah disampaikan pada hari Senin, 2 Oktober 2023 ke Sekretariat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
	2. Pelaksanaan rapat koordinasi Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/kota dengan agenda rapat tentang : a. Rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 b. LRA Bulan September 2023 c. Koordinasi ke kab/kota terkait kesepakatan pendanaan bersama lembaga penerima hibah dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara khusus untuk Kabupaten TTU d. Persiapan Laporan	Rapat koordinasi bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan agenda rapat tentang: a. Rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 yang ditujukan kepada Kepala KPPBC TMPC Kupang b. LRA Bulan September 2023 c. Koordinasi ke kab/kota terkait kesepakatan	a. Terealisasinya rencana kegiatan semester II DBH-CHT TA 2023 b. Terinformasinya LRA Bulan September 2023 c. Agar percepatan penyampaian berita acara kesepakatan pendanaan antara pemerintah Kab. TTU dengan BAWASLU Provinsi NTT d. Tersusunnya	

	Kinerja Bulan September TA 2023	pendanaan bersama lembaga penerima hibah dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara khusus untuk Kabupaten TTU d.Persiapan Laporan Kinerja Bulan September TA 2023	laporan kinerja bulan September 2023	
	3. Pelaksanaan Rapat International Standardization Organization (ISO)	Rapat International Standardization Organization (ISO)	Memperkenalkan system manajemen keamanan data pada instansi (SMKI). Manfaat utama ISO 27001 Yakni untuk melindungi dan mempertahankan keamanan informasi yang terdiri dari aspek Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas) dan Availability (Ketersediaan).	Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 September 2023
	4. Undangan mengikuti Workshop integrasi pengelolaan keuangan berbasis elektronik	Workshop integrasi pengelolaan keuangan berbasis elektronik	Adanya informasi yang diperoleh yakni: 1. Reformulasi	Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 7

	(SAKTI) bagi Satker Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kemendari	elektronik (SAKTI) bagi Satker Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada hari Kamis, 7 September 2023 di The Jayakarta Suites Komodo Flores Labuan Bajo	<p>nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) TA 2023, Digipay yang merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan.</p> <p>2. mekanisme penatausahaan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)</p> <p>3. Tips untuk mendapatkan nilai IKPA optimal</p>	September 2023 di The Jayakarta Suites Komodo Flores Labuan Bajo
	5. Undangan mengikuti rapat monitoring penyelenggara SPM kab/kota dari Inspektorat Provinsi	Rapat monitoring penyelenggara SPM kab/kota terkait Gubernur sebagai wakil	Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian targetnya melalui	Kegiatan dilaksanakan pada hari kamis, 21 September 2023 bertempat

	NTT	pemerintah pusat di daerah (GWPP) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 September 2023 di hotel Sotis Kupang	mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yakni: 1. Pemda menuangkan target tahunan rencana pencapaian SPM dalam KUA PPAS, dan RKA SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah 2. Nota kesepakatan tentang KUA PPAS yang telah disepakati antar Kepala daerah dan DPRD wajib memuat pencapaian dan penerapan SPM 3. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang	di hotel Sotis Kupang
--	-----	--	---	-----------------------

			terkait dengan pencapaian SPM yang dilakukan	
	6. Pelaksanaan FGD dengan Bank Indonesia terkait pencapaian realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan 31 Agustus 2023	FGD dengan Bank Indonesia terkait pencapaian realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan 31 Agustus 2023	Terinformasinya data realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan sampai dengan bulan Agustus 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kabupaten/Kota	Kegiatan dilaksanakan pada hari senin, 25 September 2023 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
	7. Konsultasi teknis dari Pemerintah Kabupaten TTS terkait Pengelolaan keuangan daerah	Konsultasi teknis dari Pemerintah Kabupaten TTS terkait Pengelolaan keuangan daerah	Terinformasinya pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD.	Rapat konsultasi dilakanakan pada hari selasa, 26 September 2023
	8. Mengikuti FGD terkait mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	FGD terkait mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	Mendapatkan informasi terkait tips mempertahankan opini BPK terhadap LKPD	Kegiatan dilaksanakan pada hari selasa, 26 September 2023
	9. Undangan rapat diskusi draft Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah dari Bappelitbangda Provinsi NTT yang difasilitasi oleh USAID ERAT	rapat diskusi draft Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah	Area focus yang menjadi bahan diskusi yakni: 1. Batang tubuh Pergub tentang Inovasi Daerah 2. Substansi/muatan materi	Telah dilaksanakan pada hari Rabu, 27 september 2023

			terkait kelembagaan dan keuangan 3. Draft pergub inovasi daerah dicermati dari aspek hukum yakni konsideran dan tata bahasa hukum	
--	--	--	---	--

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 1.902.327.688,- Realisasi Rp. 1.348.978.652,- (70,91%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12

Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah

Juli s.d September 2023

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI			KET
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Pengelolaan Kas Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah	335	Doc	
			Terdiri Dari SP2D :			
			LS Gaji	12	Doc	
			LS Terusan Gaji	13	Doc	
			LS Gaji Susulan	1	Doc	
			LS Gaji PPPK	45	Doc	
			LS Barang dan Jasa	53	Doc	
			GU	39	Doc	
			TU	1	Doc	
			LS Gaji Honorer	46	Doc	
			LS Modal	35	Doc	
			LS Tunj. Tamsil Guru	2	Doc	
			LS Tamsil Guru PPPK	2	Doc	
			LS PPKD	5	Doc	

			LS TPP 77 Doc LS TPP PPPK 4 Doc	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP Pindah : 1 SK SKPP BUP : 31 SK : 4 SK SKPP Meninggal : - SK : - SK SKPP Diberhentikan SKPP Pensiun Dini	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	Surat Pengantar : 1. 067/1847/BKUD3.1/2023 Tgl. 08 September 2023	
		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat : PNS : 149 org Guru : 163 org PPPK Tahap I : 10 org PPK Tahap II : 14 org	
		Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2023	- Verifikasi berkas - Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen - Pencetakan Daftar Gaji - Pencetakan SP2D - Realisasi Pembayaran	

		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaan : 4.555 Doc Pengeluaran : 373 Doc	
		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	6.550 Doc	
		Melakukan Rekapitulasi dan penyetoran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22	PNS pada 33 OPD dan 1 Anggota Dewan, Lingkup Pemprov. NTT, OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	
		Melakukan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran terhadap kredit Kendaraan Roda 2 dan 4 ke kas daerah	16 OPD dan 16 Bukti Setoran	
		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	335 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Agustus 2023 ke KPP Pratama Kupang	Surat Pengantar Nomor : 067/1830/BKUD3.3/2023 Tanggal 06 September 2023	
		Melakukan Konfirmasi Dana Pusat melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Bulan Agustus 2023 ke : 1. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta 2. Kepala KPPN Cabang Kupang	Surat Pengantar Nomor : 1. 067/1804/BKUD3.3/2023 2. 067/1805/BKUD3.3/2023 Tgl . 04 September 2023	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, Bukti Billing: Iuran Wajib Pegawai dan Bukti Billing Iuran Asuransi Kesehatan Bulan	Surat Pengantar Nomor : 1. 067/2021/BKUD3.3/2023 2. 067/2022/BKUD3.3/2023 3. 067/2023/BKUD3.3/2023 Tanggal, 29 September 2023	

		September 2023		
		Surat Keluar ditujukan kepada: 1. Plt. Pemimpin Bank NTT Cab. Utama Kupang 2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT 3. Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Registered Public Accountant 4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1. 005/1886/BKUD3.3/2023 Tgl. 13 September 2023 2. 067/1912/BKUD3.3/2023 Tgl. 15 September 2023 3. 067/1926/BKUD3.3/2023 Tgl. 18 September 2023 4. 067/1990/BKUD3.3/2023 Tgl. 26 September 2023	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan September 2023	33 Setoran	
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan September 2023	LHP BPK RI (29 kasus) Nominal Rp. 152.115.137 LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (751 kasus) Nominal Rp. 7.965.342.427,- Rincian terlampir	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	Total = 70 Surat Total = 12 Surat	

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.406.129.102,- Realisasi Rp. 2.111.881.777,- (87,77%) . Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

1. DAP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2023

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub – sub kegiatan antara lain :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp.

25.000.000 dan sampai Dengan tanggal 30 September 2023 belum di realisasi.

Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan September 2023

⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi (LRA) Bulan September 2023

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 319.457.002,- dan sampai dengan 30 September 2023 realisasi Sebesar Rp. 202.132.000,- Atau (63,27%)

Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Keuangan (Unaudited) SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA 2023;

⇒ Berkoordinasi dengan Tim pemeriksa BPK RI perwakilan Provinsi NTT terkait Pemeriksaan pendahuluan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp. 2.061.672.100,- dan realisasi sampai dengan tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 1.909.748.777,- atau (92,63%).

Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023

⇒ Tersusunnya Ranperda tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023

Tabel 3.13

**Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Juli s.d September 2023**

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	
	3. Koordinasi dan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Pert. Pelaksanaan APBD Prov.NTT	2 dokumen	2 dokumen	

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi Pelaporan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar Rp. 931.220.996.175 ,-Realisasi

Rp. 444.411.973.828,- (47,72%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

⇒ Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini merupakan salah satu program yang berada dalam satu urusan yakni Urusan Keuangan. Salah satu kegiatan dalam Program ini yang ditangani oleh Badan Keuangan Daerah adalah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga. Pagu sebesar Rp. 1.393.409.172,- Realisasi Rp. 1.309.460.075,- (93,98%). Penyusunan Standar Harga masih berlangsung hingga sekarang (kondisi 30 September 2023)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
2. Ketersediaan ASN yang masih terbatas.

b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Sesuai lampiran Surat Keputusan Badan Musyawara DPRD Provinsi NTT dengan Merujuk pada Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 Maka Jadwal yang Disampaikan Untuk Penyampaian Pandangan Umum Fraksi–Fraksi Terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Bersama Dengan Jadwal Evaluasi Teknis Oleh Kementerian Dalam Negeri atas RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

b. Solusi

1. Pemerintah Mengajukan Surat Kepada DPRD Provinsi NTT Perihal Permohonan Perubahan Jadwal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

1. Hasil Reconsiliasi data KP4 guru-guru di kota Kupang terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga baik kelebihan tunjangan suami/istri/anak.
2. Beberapa OPD masih menginput nomor rekening diaplikasi menggunakan tanda titik,spasi sehingga terjadi kendala diaplikasi SP2D online nama rekanan tidak muncul.
3. Jaringan Aplikasi SP2D online Bank NTT kurang stabil sehingga proses posting untuk transfer menjadi lambat, sudah melaporkan hal tersebut ke pihak IT Bank NTT tapi belum ada perbaikan .
4. Spesifikasi Komputer sudah tidak mendukung, Kekurangan Printer sehingga mempengaruhi proses pencetakan daftar gaji dan SKPP
5. Kurangnya UPS pada setiap unit computer PC sehingga PC rawan rusak diakibatkan jaringan listrik yang sering padam mendadak.
6. Penggunaan Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank NTT pada Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.

b. Solusi

1. Bidang perbendaharaan melakukan tindak lanjut atas Kelebihan Tunjangan Keluarga terhadap PNS dan guru-guru kota Kupang di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bidang Perbendaharaan melakukan komunikasi dengan IT Badan Keuangan Daerah Prov. NTT dan memberitahukan ke

OPD untuk menginput nomor rekening jangan menggunakan tanda baca (.,-)

3. Bank NTT diharapkan segera mengatasi masalah jaringan yang sering tidak stabil, Bidang Perbendaharaan bisa menjalin komunikasi dengan Bank NTT melaporkan hal tersebut mengingat sudah akan akhir tahun dimana volume pekerjaan akan meningkat.
4. Bisa segera dilakukan pengadaan Komputer dan Printer untuk Bidang Perbendaharaan
5. Sangat diperlukan penambahan UPS.
6. Dibentuk Tim Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Aplikasi CMS dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Bank NTT.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

1. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang akuntansi dan pelaporan, disampaikan terkait realisasi penyerapan anggaran per 30 oktober 2023 untuk bidang akuntansi dan pelaporan masih tergolong rendah hal ini disebabkan karena realisasi keuangan mengikuti schedule dan waktu pelaksanaan program/kegiatan.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2023;
2. Belum tepat waktu penyampaian data yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota yakni data penganggaran pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
3. Belum tepat waktu ditetapkannya 1 (satu) Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala

Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja;

4. Kabupaten Timor Tengah Utara belum menyepakati besaran alokasi dana Pilkada dengan BAWASLU Kab/Kota;
5. Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawab APBD Kabupaten SBD masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:
 - Pada aspek konsistensi belum ada kesesuaian penjumlahan rincian pada realisasi pendapatan yang tidak dianggarkan namun terealisasi dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada pada beberapa SKPD
 - Pada aspek kebijakan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada masih terdapat program/kegiatan/jenis/obyek/dan rincian obyek jauh melebihi yang dianggarkan, jauh dibawah yang dianggarkan, tidak terealisasi dan terealisasi tetapi tidak dianggarkan;
 - Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah yang masih dibawah dari 80%;
 - Realisasi 3 (tiga) tahun terakhir untuk PAD dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami mengalami penurunan realisasi;
 - Belanja modal asset tanah dan belanja asset lainnya yang terealisasi masih dibawah dari 80%;
 - Realisasi 3 (tiga) tahun terakhir untuk belanja pegawai, belanja modal dan BTT dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami mengalami fluktuatif;
 - Ratio Kemandirian Daerah mengalami penurunan (2,05%);
 - Pada format realisasi Dana BOS Kabupaten SBD belum menggunakan format realisasi Dana BOS sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - Masih terdapat kesalahan perhitungan pada sisa dana FKTP;

- Kinerja penagihan piutang pajak tahun 2022 relatif rendah sebagai akibat saldo piutang pajak per 31 Desember 2022 bertambah sebesar 11,44 %;
 - Pada LHP masih terdapat temuan terhadap penyusunan laporan keuangan, pendapatan, belanja dan aset.
6. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat masih terdapat ketidakpatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan Rancangan Perkada termasuk tahapan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perkada, alokasi anggaran, ketidaksesuaian antara Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS Antra lain:
- Presentase realisasi per 29 Agustus 2023 antara pendapatan dan belanja masih kurang dari 80%
 - Presentase realisasi belanja masih dibawah 50% khusus belanja barang dan jasa (47,79%), belanja hibah (29,51%) dan belanja modal (44,07%)
 - Berkurangnya transfer pusat (DAU & DAK) sebesar (3,96%) dan (4,43%) disebabkan oleh belum terpenuhinya syarat penyaluran atau keterlambatan penyaluran dari pemerintah .
 - Masih terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran belanja daerah pada 10 SKPD
 - Penetapan nilai jual objek pajak belum sesuai ketentuan
 - Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami penambahan agar memperhatikan dan memperhitungkan sisa waktu 4 bulan ini
 - Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran agar dapat dicermati apakah program/kegiatan/sub kegiatan SKPD telah

dilaksanakan atau belum karena dapat menimbulkan utang atau beban kewajiban pada akhir tahun

- Masih terdapat inkonsistensi perencanaan program/kegiatan SKPD pada RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD
7. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Belu masih terdapat ketidakpatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan Rancangan Perkada seperti alokasi anggaran, ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan Dokumen RKPD, KUA dan PPAS antara Lain :
- Presentase realisasi per 4 September 2023 antara pendapatan dan belanja masih kurang dari 80%
 - Presentase realisasi belanja masih dibawah 50% khusus belanja barang dan jasa (44,22%), belanja hibah (16,82%) dan belanja modal (20,42%) dan bansos (0,00%)
 - Masih terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran belanja modal pada 2 (dua) SKPD
 - Pengelolaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah masih belum tertib
 - Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah pada 2 (dua) SKPD belum optimal
 - Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami penambahan agar memperhatikan dan memperhitungkan sisa waktu 4 bulan ini
 - Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran agar dapat dicermati apakah program/kegiatan/sub kegiatan SKPD telah dilaksanakan atau belum karena dapat menimbulkan utang atau beban kewajiban pada akhir tahun

- Masih terdapat inkonsistensi perencanaan program/kegiatan SKPD pada RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD.
8. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur masih terdapat ketidakpatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan Rancangan Perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perkada, alokasi anggaran, ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS antara lain:
- Presentase realisasi per 31 Agustus 2023 antara pendapatan dan belanja masih kurang dari 80%
 - Presentase realisasi belanja masih dibawah 50% khusus belanja barang dan jasa (28,43%), belanja hibah (4,56%) dan belanja modal (29,81%) dan bansos (6,96%)
 - Masih terdapat kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa untuk pengadaan asset tetap
 - Masih terdapat kesalahan penganggaran belanja modal untuk pengadaan bahan pakai habis/persediaan
 - Tidak dipungutnya retribusi IMB
 - Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami penambahan agar memperhatikan dan memperhitungkan sisa waktu 4 bulan ini
 - Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran agar dapat dicermati apakah program/kegiatan/sub kegiatan SKPD telah dilaksanakan atau belum karena dapat menimbulkan utang atau beban kewajiban pada akhir tahun
 - Masih terdapat inkonsistensi perencanaan program/kegiatan SKPD pada RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD.

9. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat ketidakpatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan Rancangan Perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perkada, alokasi anggaran, ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat ketidakpatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan Rancangan Perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perkada, alokasi anggaran, ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS antara Lain :

- Presentase realisasi per 11 September 2023 antara pendapatan dan belanja masih kurang dari 80%
- Presentase realisasi belanja masih dibawah 50% khusus belanja barang dan jasa (46,31%), dan belanja modal (42,21%)
- Pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum tertib
- Pembayaran honorarium forum koordinasi pimpinan daerah belum sesuai dengan peraturan presiden no 33 tahun 2020 tentang standar harga regional
- Realisasi belanja makanan dan minuman pada kegiatan reses DPRD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid dan memadai
- Pemberian hibah belum didukung dengan dokumen memadai dan peraturan bupati tentang pedoman pemberian hibah belum dimutakhirkan

- Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami penambahan agar memperhatikan dan memperhitungkan sisa waktu 4 bulan ini
 - Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran agar dapat dicermati apakah program/kegiatan/sub kegiatan SKPD telah dilaksanakan atau belum karena dapat menimbulkan utang atau beban kewajiban pada akhir tahun
 - Masih terdapat inkonsistensi perencanaan program/kegiatan SKPD pada RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD.
10. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngada masih terdapat ketidakpatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan Rancangan Perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perkada, alokasi anggaran, ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS antara lain:
- Ketidaktaatan terhadap tahapan penyusunan Perda perubahan APBD TA 2023
 - Presentase realisasi per 18 September 2023 antara pendapatan dan belanja masih kurang dari 70 %
 - Presentase realisasi belanja masih dibawah 50% khusus belanja barang dan jasa (32,28%), belanja hibah (23,73%) dan belanja modal (19,14%)
 - 21 rekening dana non kapitasi pada dinas kesehatan dan FKTP belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta dana non kapitasi dan dana prolans FKTP digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD

- Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami penambahan agar memperhatikan dan memperhitungkan sisa waktu 4 bulan ini
- Pergeseran anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran agar dapat dicermati apakah program/kegiatan/sub kegiatan SKPD telah dilaksanakan atau belum karena dapat menimbulkan utang atau beban kewajiban pada akhir tahun
- Masih terdapat inkonsistensi perencanaan program/kegiatan SKPD pada RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menetapkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja. Selain itu khusus untuk Kabupaten TTU agar dapat melakukan koordinasi yang intensif dengan BAWASLU Kabupaten TTU untuk menyepakati pagu anggaran dan rincian Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun Anggaran 2024
3. Pemerintah Kabupaten/Kota didorong untuk menyiapkan Penganggaran Pilkada sesuai hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Tanggal 14 April 2023 di Kupang.
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar hal-hal teknis yang

menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2022 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun mendatang.

5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Flotim dan kabupaten Ngada agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2023 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun mendatang.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Triwulan 3 Tahun 2023 ini disusun, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Oktober 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Drs. ZAKARIAS MORUK, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19631209 198603 1 016